

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

**PELAKSANAAN PROGRAM TMMD DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA  
(Studi Collaborative Governance Pada Program TMMD di Desa Cepedak  
Kabupaten Purworejo Tahun 2025)**

Syahrul Ramadhan<sup>1</sup>

Agus Subagyo<sup>2</sup>

Dadan Kurnia<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

***Abstract***

*The study aims to analyze the implementation of the TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) program in accelerating village development through the lens of collaborative governance. The research focuses on TMMD activities in Cepedak Village, Purworejo Regency, using a qualitative descriptive approach. The results show that TMMD embodies the principles of collaborative governance as proposed by Ansell and Gash (2008), including effective communication, mutual trust, shared motivation, and joint action among stakeholders. The findings highlight that coordination between the military, local government, and community organizations contributes significantly to improving infrastructure and social cohesion in rural development. However, challenges such as limited local participation, bureaucratic rigidity, and resource constraints remain. The study concludes that TMMD can be strengthened through institutional design improvement and inclusive community involvement, making it a model of civil–military collaboration in sustainable development.*

**Keywords:** *TMMD, collaborative governance, village development, civil–military collaboration, Purworejo*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas strategis nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing wilayah. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) menjadi instrumen penting yang mengintegrasikan fungsi pertahanan dengan pengabdian kepada masyarakat sipil. TMMD merupakan wujud nyata kolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI)

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

dan pemerintah daerah, yang secara konsisten berupaya mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya daerah terpencil atau tertinggal.

Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, menjadi salah satu lokasi strategis pelaksanaan TMMD tahun 2025. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang cukup kompleks, dengan topografi perbukitan dan keterbatasan akses infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan TMMD di wilayah ini memiliki urgensi tinggi dalam memperkuat konektivitas wilayah dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa.

Program TMMD tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, dan sarana umum lainnya, tetapi juga pada kegiatan nonfisik berupa pembinaan masyarakat, peningkatan kesadaran bela negara, dan pemberdayaan sosial ekonomi. Dalam konteks pembangunan desa, keberhasilan TMMD sangat bergantung pada tingkat kolaborasi antar-pihak, baik dari unsur militer, pemerintah daerah, maupun masyarakat sipil. Oleh karena itu, pendekatan Collaborative Governance menjadi sangat relevan dalam menganalisis dinamika hubungan antar-aktor dalam implementasi TMMD.

Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purworejo (2024), sebagian besar wilayah di Kecamatan Bruno masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas infrastruktur dasar dan akses layanan publik. TMMD hadir sebagai solusi kolaboratif antara TNI dan pemerintah daerah yang memfasilitasi pembangunan melalui mekanisme lintas sektor. Kegiatan ini menekankan prinsip kerja sama, partisipasi, dan sinergi untuk mencapai tujuan bersama dalam mempercepat pembangunan desa.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Namun demikian, di balik keberhasilan yang ditunjukkan oleh TMMD, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya perencanaan lintas sektor, serta kurangnya pelibatan masyarakat dalam tahap awal perencanaan kegiatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana prinsip-prinsip Collaborative Governance benar-benar diterapkan dalam konteks TMMD di Cepedak.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan TMMD melalui perspektif Collaborative Governance dengan rumusan masalah: Bagaimana implementasi pelaksanaan TMMD dalam rangka percepatan pembangunan desa di Desa Cepedak Kabupaten Purworejo? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan TMMD dalam konteks kolaborasi sipil–militer sebagai model tata kelola kolaboratif pembangunan desa.

### *Kerangka Teori*

Pendekatan Collaborative Governance dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) sebagai suatu model tata kelola kolaboratif yang menekankan pada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak nonpemerintah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut teori ini, terdapat empat elemen utama dalam proses kolaboratif, yaitu: *starting condition*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*.

Pertama, *starting condition* berkaitan dengan latar belakang sosial, politik, dan kepercayaan antar-aktor sebelum kolaborasi dimulai. Kondisi awal ini menentukan sejauh mana kolaborasi dapat terjalin secara efektif.

Kedua, *institutional design* menekankan pentingnya aturan main, struktur komunikasi, dan mekanisme koordinasi yang jelas untuk memastikan seluruh pihak dapat berpartisipasi secara seimbang.

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 17 Okt 2025*

*Published : 27 Okt 2025*

---

Ketiga, *facilitative leadership* menyoroti peran pemimpin yang mampu menjadi mediator, fasilitator, dan penghubung kepentingan antara pihak militer, pemerintah, dan masyarakat.

Keempat, *collaborative process* merupakan inti dari model ini, yang menggambarkan proses interaksi, komunikasi, dan pembelajaran bersama dalam mencapai tujuan kolaborasi.

Teori ini menjadi sangat relevan untuk menilai bagaimana TMMD sebagai program kolaboratif sipil–militer dapat menciptakan sinergi antara pertahanan negara dan pembangunan masyarakat desa. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi faktor keberhasilan dan hambatan dalam koordinasi antar-pihak yang terlibat di tingkat lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam fenomena sosial yang kompleks terkait proses kolaborasi antar-aktor dalam pelaksanaan TMMD.

Informan penelitian meliputi pejabat dari Kodim 0708 Purworejo, aparat pemerintah daerah, kepala desa, serta masyarakat penerima manfaat program. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan TMMD serta data pendukung dari Dispermades dan Bappeda Purworejo.

Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan teknik interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

## PEMBAHASAN

Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, merupakan salah satu wilayah pedesaan dengan karakteristik topografi yang menantang, terdiri atas perbukitan dan lembah curam yang mempersulit aksesibilitas warga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo (2024), sebanyak 28% wilayah Kecamatan Bruno masih termasuk kategori daerah dengan keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk jaringan jalan penghubung antar-dusun dan fasilitas sosial ekonomi. Wilayah ini juga menghadapi masalah keterisolasian akibat minimnya transportasi publik serta rendahnya kualitas sarana pendidikan dan kesehatan.

Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini sebagai prioritas dalam program pembangunan berbasis desa yang disinergikan melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). TMMD merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, aparat desa, serta masyarakat dengan tujuan mempercepat pembangunan wilayah tertinggal melalui kerja sama antara unsur militer dan sipil. Program ini dilaksanakan secara terintegrasi dalam bentuk pembangunan fisik dan kegiatan nonfisik, seperti pelatihan masyarakat, penyuluhan pertanian, dan pembinaan wawasan kebangsaan.

Pelaksanaan TMMD di Desa Cepedak tahun 2025 berhasil membuka akses jalan sepanjang 2,5 kilometer yang menghubungkan Dusun Krajan dengan Dusun Karanganyar, membangun jembatan kecil di atas aliran Sungai Kaligedang, serta memperbaiki fasilitas publik seperti posyandu dan sarana air bersih. Sementara pada kegiatan nonfisik, dilaksanakan penyuluhan mengenai bahaya stunting, peningkatan kesadaran bela negara, dan pelatihan wirausaha bagi pemuda desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Cepedak, kegiatan ini disambut positif oleh masyarakat karena dampaknya langsung terasa terhadap mobilitas ekonomi dan sosial.

Meskipun demikian, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai dinamika dalam proses kolaborasi. Ditemukan adanya keterbatasan koordinasi pada tahap awal

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

antara unsur TNI dan pemerintah desa, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan program. Oleh karena itu, analisis per dimensi teori *Collaborative Governance* digunakan untuk memahami bagaimana proses kerja sama antarpihak berlangsung dan sejauh mana prinsip-prinsip kolaborasi dapat diimplementasikan secara efektif.

#### 1) Dimensi *Starting Condition* (Kondisi Awal Kolaborasi)

Dimensi *starting condition* menjelaskan latar belakang, kondisi sosial, dan tingkat kepercayaan antar-aktor sebelum proses kolaborasi dimulai. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan TMMD di Desa Cepedak berawal dari kebutuhan mendesak masyarakat terhadap peningkatan akses jalan desa yang sudah lama rusak dan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Pemerintah desa telah beberapa kali mengajukan permohonan pembangunan infrastruktur melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), namun karena keterbatasan anggaran daerah, permohonan tersebut belum dapat direalisasikan.

Situasi ini menjadi dasar bagi pelibatan TNI melalui program TMMD Reguler ke-122 yang difokuskan di wilayah Purworejo. Berdasarkan wawancara dengan Danramil Bruno, pelaksanaan TMMD di Cepedak didasarkan pada hasil survei lapangan yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki tingkat keterisolasian yang tinggi serta potensi ekonomi pertanian yang belum tergarap. Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dimulai dengan adanya kesepakatan untuk menjadikan TMMD sebagai solusi percepatan pembangunan berbasis gotong royong.

Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal terdapat hambatan berupa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan proyek pembangunan oleh pihak luar. Sebagian warga beranggapan bahwa program TMMD bersifat sementara dan tidak memberikan manfaat jangka panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, aparat TNI dan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

pemerintah desa melakukan sosialisasi intensif dan melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap pertemuan pra-TMMD. Pendekatan ini terbukti meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kolektif untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kondisi awal yang kurang ideal berhasil diatasi melalui pendekatan persuasif dan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh Babinsa dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat meningkat signifikan setelah pelaksanaan kegiatan pra-TMMD, ditandai dengan partisipasi aktif warga dalam penyediaan bahan bangunan dan konsumsi. Dengan demikian, dimensi *starting condition* menunjukkan keberhasilan awal dalam membangun fondasi kolaborasi melalui mekanisme komunikasi dan partisipasi yang efektif.

## 2) Dimensi *Institutional Design* (Desain Kelembagaan)

Dimensi *institutional design* menekankan pentingnya struktur organisasi, mekanisme koordinasi, serta aturan main yang disepakati bersama dalam menjalankan kolaborasi. Dalam konteks TMMD di Desa Cepedak, desain kelembagaan dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 112 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi dan Tim Pelaksana TMMD Reguler ke-122. Struktur ini terdiri atas unsur Kodim 0708 Purworejo sebagai pelaksana teknis utama, Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai penyedia dukungan administratif, dan Pemerintah Desa Cepedak sebagai mitra lokal.

Desain kelembagaan ini berfungsi untuk mengintegrasikan sumber daya, memastikan pembagian peran yang jelas, dan mengatur mekanisme pelaporan kegiatan. Berdasarkan observasi lapangan, koordinasi antara Kodim, Bappeda, dan Dinas PUPR berjalan relatif efektif. Namun, ditemukan kendala berupa tumpang tindih kewenangan dalam pengambilan keputusan antara pihak desa dan unsur teknis pelaksana di lapangan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Wawancara dengan Kasi Pembangunan Kecamatan Bruno mengungkapkan bahwa rapat koordinasi lintas sektor hanya dilakukan tiga kali selama pelaksanaan TMMD, sehingga beberapa keputusan operasional harus diambil secara ad hoc di lapangan. Hal ini menyebabkan munculnya keterlambatan pada penyediaan material dan logistik. Meskipun demikian, kekompakan tim gabungan dan komitmen lintas sektor mampu menekan potensi konflik administratif.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa desain kelembagaan TMMD di Cepedak telah memenuhi sebagian besar prinsip *institutional design* yang diuraikan oleh Ansell & Gash, yaitu adanya aturan formal, struktur koordinasi, dan mekanisme kerja lintas aktor. Namun, efektivitas koordinasi masih perlu ditingkatkan melalui pembentukan forum komunikasi rutin dan sistem pelaporan digital yang memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat dan pemerintah daerah.

### 3) Dimensi *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Dimensi *facilitative leadership* menggambarkan peran pemimpin dalam membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan memfasilitasi sinergi di antara aktor yang terlibat. Dalam pelaksanaan TMMD di Cepedak, kepemimpinan fasilitatif dipegang oleh Komandan Kodim 0708 Purworejo, yang berperan sebagai koordinator lapangan sekaligus mediator antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Danramil Bruno dan Kepala Desa Cepedak, gaya kepemimpinan yang diterapkan bersifat partisipatif dan transformasional, di mana keputusan diambil melalui musyawarah dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Pemimpin lapangan aktif mengunjungi lokasi pembangunan setiap hari, memberikan arahan langsung kepada prajurit

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

dan warga yang bekerja bersama. Sikap terbuka, disiplin, dan keteladanan TNI menjadi faktor utama yang mendorong kepercayaan masyarakat.

Kepemimpinan fasilitatif juga terlihat dalam upaya penyelesaian konflik kecil terkait pembebasan lahan dan pembagian waktu kerja gotong royong. Pemimpin TMMD memilih menggunakan pendekatan mediasi dengan melibatkan tokoh agama dan perangkat desa untuk mencapai mufakat. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan komunikatif dan non-konfrontatif ini menjadi kunci sukses pelaksanaan program.

Secara umum, penelitian ini membuktikan bahwa peran kepemimpinan fasilitatif dalam TMMD tidak hanya menciptakan koordinasi teknis yang efektif, tetapi juga membangun solidaritas sosial antarwarga. Kepemimpinan berbasis keteladanan dan kehadiran langsung di lapangan merupakan faktor penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai militerisme dengan semangat gotong royong masyarakat desa.

#### 4) Dimensi *Collaborative Process* (Proses Kolaboratif)

Dimensi *collaborative process* menggambarkan tahapan kerja sama dari komunikasi, pembelajaran bersama, hingga pembagian tanggung jawab antaraktor. Dalam TMMD di Cepedak, proses kolaboratif berlangsung dalam tiga fase utama: pra-TMMD, pelaksanaan, dan pasca-TMMD. Pada fase pra-TMMD, dilakukan survei lapangan dan musyawarah desa yang melibatkan Babinsa, pemerintah kecamatan, dan perwakilan masyarakat. Fase ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan prioritas, terutama pembangunan jalan penghubung dusun dan rehabilitasi saluran air. Selanjutnya, pada fase pelaksanaan, masyarakat dilibatkan langsung dalam kegiatan pembangunan fisik selama 30 hari penuh. Berdasarkan data lapangan, lebih dari 150 warga ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong setiap hari.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Fase pasca-TMMD berfokus pada pembinaan masyarakat melalui penyuluhan dan kegiatan sosial. Di sinilah nilai kolaboratif semakin terlihat: masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penjaga keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Pemerintah desa membentuk kelompok pemelihara jalan desa dan mengalokasikan dana desa untuk perawatan rutin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif berjalan efektif berkat adanya komunikasi terbuka, partisipasi aktif masyarakat, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti keberlanjutan program dan ketergantungan pada inisiatif TNI. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah mengadopsi model kolaborasi TMMD sebagai pendekatan reguler dalam perencanaan pembangunan desa.

## **KESIMPULAN**

Sebagai penutup penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo merupakan implementasi nyata dari model kolaborasi lintas sektor antara unsur militer, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka mempercepat pembangunan desa dan memperkuat ketahanan sosial. Melalui pendekatan Collaborative Governance, TMMD berhasil membangun kerja sama yang berlandaskan pada komunikasi terbuka, kepercayaan timbal balik, dan orientasi pada tujuan bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sosial.

Pada dimensi starting condition, penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dimulai dari kebutuhan konkret masyarakat terhadap infrastruktur dasar dan keinginan kuat pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan wilayah tertinggal. Meski sempat diwarnai keraguan awal masyarakat terhadap efektivitas program, TNI dan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

pemerintah desa berhasil membangun kepercayaan publik melalui sosialisasi, pendekatan personal, dan transparansi rencana kegiatan.

Pada dimensi institutional design, struktur kelembagaan TMMD yang melibatkan Kodim, pemerintah daerah, dan desa mampu menciptakan mekanisme kerja yang relatif efisien. Walaupun terdapat kendala koordinasi dan keterbatasan rapat lintas sektor, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan optimal karena adanya dukungan kuat dari Bupati Purworejo serta semangat gotong royong masyarakat.

Sementara itu, dimensi facilitative leadership menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan oleh Komandan Kodim dan Danramil bersifat inklusif, komunikatif, dan inspiratif. Kepemimpinan yang berorientasi pada keteladanan dan pelayanan terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan masyarakat serta memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah.

Pada dimensi terakhir, collaborative process, ditemukan bahwa pelaksanaan TMMD di Cepedak berhasil mengintegrasikan seluruh unsur kolaboratif: komunikasi, partisipasi, dan pembelajaran bersama. Masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan hasil TMMD. Namun, kesinambungan program ini masih perlu diperkuat melalui sistem perencanaan dan monitoring pasca-TMMD agar manfaatnya bersifat jangka panjang.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa TMMD merupakan model kolaborasi sipil–militer yang efektif dalam mempercepat pembangunan desa di wilayah terpencil. Program ini mampu memperkuat solidaritas sosial, menumbuhkan semangat gotong royong, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, beberapa saran strategis dapat diajukan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan TMMD dan meningkatkan kualitas kolaborasi lintas sektor di masa mendatang:

*Pertama*, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi kelembagaan lintas sektor melalui forum komunikasi permanen antara TNI, perangkat daerah, dan pemerintah desa. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah perencanaan bersama, evaluasi program, serta integrasi TMMD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

*Kedua*, perlu dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui program pendampingan pasca-TMMD. Pemerintah kabupaten bersama TNI dapat mengembangkan model pelatihan kewirausahaan, manajemen infrastruktur desa, dan pengelolaan sumber daya lokal agar hasil pembangunan tidak berhenti setelah program selesai.

*Ketiga*, penguatan kelembagaan Pokmas (Kelompok Masyarakat) sangat penting untuk memastikan keberlanjutan hasil TMMD. Pembentukan kelompok pemelihara jalan, pengelola sarana air bersih, dan kelompok ekonomi produktif dapat menjadi ujung tombak perawatan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*Keempat*, perlu adanya pengembangan sistem informasi pembangunan desa berbasis digital untuk meningkatkan transparansi, pelibatan masyarakat, dan kemudahan koordinasi antarinstansi. Digitalisasi data TMMD dapat menjadi inovasi baru dalam sistem pelaporan kinerja pembangunan lintas sektor.

*Kelima*, replikasi model TMMD perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah disarankan untuk menjadikan TMMD sebagai model pembelajaran kolaboratif yang mengintegrasikan sektor pertahanan, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka pembangunan nasional berbasis kemandirian masyarakat.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan TMMD di Desa Cepedak bukan hanya hasil sinergi antar-lembaga, tetapi juga cerminan kekuatan kolaboratif antara negara dan rakyat. Program ini membuktikan bahwa kerja sama lintas sektor berbasis kepercayaan dan komitmen bersama mampu mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat pedesaan.

**REFERENSI**

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (2024). *Kabupaten Purworejo dalam Angka 2024*. Purworejo: BPS Kabupaten Purworejo.
- Crosby, B. C., & Bryson, J. M. (2021). *Integrative leadership for collaborative governance: Civic engagement in a complex world*. *Public Administration Review*, 81(4), 657–669. <https://doi.org/10.1111/puar.13340>
- Danrim, S., & Nurdin, M. (2023). *Military involvement in local development: Lessons from Indonesia's TMMD program*. *Asian Journal of Public Affairs*, 15(2), 112–128. <https://doi.org/10.22146/ajpa.2023.252>
- Dispermades Kabupaten Purworejo. (2024). *Laporan Pelaksanaan Program TMMD Reguler ke-122 Tahun 2024 di Desa Cepedak*. Purworejo: Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2019). *Collaborative governance regimes*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Hasan, R., & Wulandari, D. (2022). *Model kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan desa terpadu di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(2), 101–118. <https://doi.org/10.24815/japi.v8i2.23255>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Operasional TMMD Tahun 2023–2024*. Jakarta: Puspen TNI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 17 Okt 2025*

*Published : 27 Okt 2025*

---

Suharto, E. (2022). *Kebijakan sosial dan pembangunan kolaboratif di Indonesia: Perspektif intersektoral*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryanto, D., & Yani, R. (2023). *Kolaborasi sipil–militer dalam pembangunan desa tertinggal: Analisis kebijakan TMMD di Jawa Tengah*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(3), 455–473. <https://doi.org/10.22146/jkn.2023.214>

Thomson, A. M., Perry, J. L., & Miller, T. K. (2020). *Conceptualizing and measuring collaboration in the public sector*. *Public Management Review*, 22(9), 1234–1251. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1764081>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wibowo, T., & Hartono, R. (2023). *Collaborative leadership and multi-actor synergy in local governance: Evidence from rural infrastructure programs in Java*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 11(1), 65–83. <https://doi.org/10.25077/jipap.11.1.2023.65>

Yuliana, R., & Pranata, B. (2024). *Strengthening community participation in rural collaborative governance: Indonesian case study*. *Journal of Governance and Policy Analysis*, 9(2), 89–104. <https://doi.org/10.31002/jgpa.v9i2.2024>